

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Dalam konsep teori keagenan, manajemen sebagai agen semestinya menjunjung tinggi kepentingan *shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola inilah yang disebut *agency problem* (Jensen dan Meckling dalam Siallagan, 2006). Dalam teori keagenan, terdapat hubungan sisi positif dan sisi negatif dalam konsep managerial salah satunya terjadi dalam hubungan antara agensi teori (*agency theory*) dan manajemen laba. Hubungan agensi antara pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisma dalam konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen semestinya menjunjung tinggi kepentingan terhadap *shareholders*

akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola inilah yang disebut *agency problem* (Jensen dan Meckling dalam Siallagan, 2006). Dalam teori keagenan, terdapat hubungan sisi positif dan sisi negatif dalam konsep managerial salah satunya terjadi dalam hubungan antara agensi teori (*agency theory*) dan manajemen laba. Hubungan agensi antara pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab (sulistyanto, 2008:30). Namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu munculnya permasalahan agensi (*agency problem*) antara pemilik dan pengelola perusahaan. Permasalahan ini muncul karena ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan dalam perkembangannya permasalahan agensi juga menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, yaitu calon investor, kreditur, supplier, dan *stakeholder* lainnya. Permasalahan yang muncul dari keinginan manager

untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mengelabui pemilik dan *stakeholder* lain yang tidak mempunyai akses dan informasi yang memadai. Manajemen laba memang merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemilik (*principals*) kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik. Konsep managerial yang mengatur hubungan antara pemilik dan pengelola ini menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.

Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari suatu perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban untuk memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan mengenai kondisi perusahaan. Sinyal itu dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan principal adalah adanya asimetri informasi. Dengan asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

B. Ukuran Perusahaan

1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.”

Selanjutnya ukuran perusahaan menurut (Agus Sartono, 2010:249) didefinisikan sebagai berikut: “Perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar”

Menurut Setiyadi (2007) ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

- a. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
- b. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
- c. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
- d. Total aset, merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

2 Kategori Usaha Mikro

- 1 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan badan usaha perorang yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan. Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.” Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham and Houston 2012).

C. Manajemen Laba

1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan dan menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya, tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (sulistyanto, 2008:49). Pandangan terkini tentang manajemen laba dikemukakan oleh Healy dan Wahlen (1998) yang menyebutkan bahwa manajemen laba adalah proses dimana manajer memiliki kemampuan untuk menyesatkan *stakeholders* atau

mempengaruhi hasil kontaktual mereka dengan pemegang owner. Dengan semakin berkembangnya penelitian akuntansi keuangan dan keprilakuan saat ini. Terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba yang berbeda antara satu dengan yang lainnya menurut pemahaman dan penelitian orang yang mendefinisikan terhadap pengelolaan dan peraturan laba itu.

Secara umum ada beberapa definisi mengenai manajemen laba satu dengan yang lain, yaitu :

- 1 Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya, tanpa menyebabkan kenaikan ataupun penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (sulistyanto, 2008:49)
- 2 Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya (sulistyanto, 2008:49)
- 3 Manajemen laba adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan (Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan 2002:2). Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder*

yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk memengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda namun memiliki benang merah yang menghubungkan antara satu definisi dengan definisi lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas yang mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan.

2 Pola dalam Manajemen Laba

Pada dasarnya, terdapat empat pola dasar dalam manajemen laba, yaitu :

a. Cuci Bersih (*Taking a Bath*)

pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

b. Menurunkan Laba (*Income Minimization*)

Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

c. Menaikan Laba (*Income Maximization*)

Tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Selain untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, cara ini juga bisa melindungi

perusahaan saat melakukan pelanggaran perjanjian utang. Tindakan yang dilakukan manajemen adalah dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan.

d. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Terdapat tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi *positive* (*positive accounting theory*), yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi manajemen laba, menurut Watts dan Zimmerman (1986), yaitu:

1) *Bonus plan hypothesis*

Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji berkaitan dengan perjanjian bisnis itu, yaitu bonus atau kompensasi manajerial.

2) *Debt (equity) hypothesis*

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan

upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya.

3) *Politic cost hypotesis*

Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan anti trust dan monopoli. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh dari perusahaan selama periode tertentu

3 Faktor dalam Manajemen Laba

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya manajemen laba tersebut telah banyak diuraikan oleh para pakar dan telah banyak dilakukan penelitian empiris untuk mendukung adanya korelasi antara faktor-faktor pendorong tersebut terhadap praktek manajemen laba, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri.

Faktor-faktor pendorong tersebut penulis seleksi, ringkas, dan gabungkan antara lain sebagai berikut:

a. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manager dalam menjalankan operasional perusahaan. Manajer akan berusaha mengatur laba bersih sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan bonusnya. Manajer yang memiliki informasi atas

laba bersih perusahaan yang sebenarnya akan bertindak oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini ataupun menyimpannya untuk tahun-tahun yang akan datang. Dalam pemberian bonus berdasarkan atas laba ini, dikenal dua istilah, *bogey* (batas bawah) yang terkadang juga disebut *floor* dan *cap* (batas atas). *Bogey* adalah target laba minimum yang menjadi syarat agar manajer dapat memperoleh bonus atas kinerjanya. Besarnya bonus yang diperoleh tersebut akan meningkat secara proporsional seiring dengan meningkatnya laba tahun yang bersangkutan, selama laba tersebut berada dalam batasan atau di antara *bogey* dan *cap*. Sedangkan *cap* adalah target laba maksimum dimana jika laba tahun yang bersangkutan melebihi target laba ini, manajer tidak akan mendapat tambahan bonus secara proporsional atas selisih laba dengan target laba ini.

b. Motivasi Politik

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. Scott (2000: 302) dalam Rahmawati dkk. (2006)

c. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, tingginya ekspansi perusahaan, manajer sering kali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar kreditor

mau menginvestasikan dananya diperusahaannya, tentunya manager harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal atau pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif manager untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun sering kali muncul

d. Motivasi Pajak

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.

e. Motivasi Pergantian Direksi

Banyak motivasi yang muncul berkaitan dengan CEO. CEO yang mendekati masa pensiun akan berusaha meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba. CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya, berusaha menghindari pemecatannya dengan meningkatkan laba. CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya dan membuka peluang agar laba periode mendatang meningkat, membebaskan biaya periode mendatang pada periode berjalan yang otomatis akan menurunkan laba periode berjalan. Hal-hal tersebut pun dapat menjadi motivasi manager untuk melakukan praktik-praktik manajemen laba.

f. Motivasi Penjualan Saham

Pada penawaran saham perdana dan penawaran saham musiman, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang penting bagi calon investor. Manager perusahaan yang *go public* akan cenderung

melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas saham perdananya dengan harapan mendapatkan respons positif dari investor terhadap peramalan laba sebagai sebuah sinyal dari nilai perusahaan, begitu pula dalam hal penawaran saham musiman.

D. Good Corporate Governance

1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tercapainya dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain

yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

2 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Surya dan Yustiavandana (2006:68) menyebutkan bahwa secara umum, penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance*, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan
- b. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap Perusahaan
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Selain tujuan penerapan *good corporate governance*, adapun manfaat yang bisa diperoleh dengan menerapkan *good corporate governance* pada perusahaan (FCGI, 2011) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih mudah untuk menambah modal
- b. Biaya modal yang lebih rendah
- c. Peningkatan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi yang terus membaik
- d. Berdampak baik pada harga saham. (Karena situasi Indonesia saat ini, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara)

Sedangkan Tujuan dan manfaat GCG menurut Komite Nasional *Corporate Governance* (KNKG, 2006) adalah:

- a. Dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi.
- b. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan RUPS.
- c. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Di Indonesia, KNKG (2006) menetapkan lima prinsip *good corporate governance* yang tercantum dalam pedoman umum *good corporate governance*. Kelima prinsip tersebut adalah :

- a. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat serta di dalam lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*),

Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

4 Penjelasan Masing-Masing GCG

Penelitian ini menggunakan empat mekanisme *good corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Penjelasan untuk masing – masing mekanisme tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua *mekanisme good corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). *Agency Conflict* adalah konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent. Konflik keagenan ini dipengaruhi oleh adanya insider *ownership*. Insider *ownership* adalah pemilik perusahaan yang merangkap sebagai pengelola perusahaan. Peningkatan insider *ownership* akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan (Sulito, 2008).

Semakin besar insider *ownership*, maka perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan (manajemen) semakin kecil karena mereka akan bertindak dengan lebih hati – hati karena manajer juga ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Apabila kepemilikan insider *ownership* kecil berarti hanya sedikit jumlah pemegang saham yang

ikut terlibat dalam mengelola perusahaan sehingga semakin tinggi pula kemungkinan munculnya masalah keagenan.

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena manajer merupakan salah satu pemilik perusahaan dan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan.

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif (Mukhtaruddin, 2014). Dengan demikian, semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Selain itu, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen sehingga dengan

adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Perdana dan Raharja (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen monitoring ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manager (Wiranta dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

c. Komisaris Independen.

Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris yang salah satunya adalah komisaris independen. Istilah independen pada komisaris

independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor (Surya dan Yustiavandana, 2006:133). Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dengan pengertian bahwa mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, demi tercapainya kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip GCG.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir serta tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dengan demikian komisaris independen dapat diartikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata

untuk kepentingan perseroan. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), saat ini keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris suatu perusahaan. Hal ini mengacu pada peraturan BEI yang mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang – kurangnya 30% dari jajaran dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS (organ perseroan terbatas) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham tersebut tercatat.

Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik (Surya dan Yustiavandana, 2006). Sedangkan fungsi komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan, memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan serta memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG. Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan

karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer (Muryati dan Suardikha, 2014).

d. Komite Audit.

Agency theory memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 2011). Surya dan Yustiavandana (2006:145) menyebutkan bahwa komite audit adalah “organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG”. Sedangkan berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK) No: Kep – 643/BL/2012 pengertian dari komite audit adalah : Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen.

Dengan demikian komite audit dapat diartikan sebagai komite yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan demi terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance*. Komite audit bertugas

untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.

Keberadaan komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Hal ini karena berhubungan dengan fungsi komite audit untuk pengawasan integritas laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

E. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty,2005)

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga dengan pelaporan laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik untuk menanamkan dananya.

Hasil penelitian Halim, dkk. (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang cukup signifikan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manager untuk melakukan manajemen laba dimana perusahaan besar memiliki aktifitas operasional yang lebih kompleks selain itu perusahaan besar juga lebih dituntut untuk memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi.

F. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Arifani, 2012). Peran komisaris independen diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stake-holder* menjadi kehilangan makna. Laporan keuangan tidak lagi secara objektif menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami oleh perusahaan, sebab aktivitas rekayasa manajerial ini dimanfaatkan manajer untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang pernah dilakukannya. Bahkan manajemen laba juga dimanfaatkan manajer untuk merencanakan kecurangan-kecurangan yang akan dilakukannya dimasa depan. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban manajer kepada *stakeholder* perusahaan. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan semua transaksi dan kejadian yang telah dilakukan dan dialaminya selama satu periode tertentu. Manajer harus

mengungkapkan semua informasi dan tidak boleh menyembunyikan informasi tertentu sebab informasi ini akan digunakan *stakeholder* perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis.

Oleh sebab itu, upaya untuk merekayasa informasi akuntansi hanya membuat laporan keuangan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai media pertanggungjawaban manajer kepada semua pihak yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Laporan keuangan tidak mampu menjadi cermin tanggung jawab manajer dalam mengelola sebuah perusahaan.

Ada beberapa kerugian yang terpaksa harus ditanggung oleh berbagai pihak akibat manajemen laba itu. Pertama, perusahaan pada suatu saat akan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan rekayasa keuangan ini, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kedua *stakeholder* yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar membuat keputusan memperoleh informasi palsu sehingga keputusan-keputusan strategis dan ekonomis yang dibuatnya pun menjadi keliru. Apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Inilah yang membuat mengapa manajemen laba menjadi satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia.

Salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengeliminir manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditengarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua,

sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya.

Untuk itu salah satu kunci utama untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menghambat manajer untuk menyembunyikan, mengubah, atau menunda informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan mendorong manajer hanya melakukan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan. Atas dasar pemikiran ini maka dalam pengelolaan perusahaan yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai pengawas dan pengendali tindakan dan keputusan manajer perusahaan. Untuk itulah dalam prinsip *good corporate governance* ditekankan pentingnya komite audit dan komisaris independen sebagai pengawas dan pengendali sebuah perusahaan.

Ada harapan yang ingin diwujudkan dengan dibangunnya sistem pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance*, yaitu menurunnya manajemen laba dalam sebuah perusahaan. Apalagi secara empiris memang terbukti bahwa *penerapan good corporate governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasannya, karena prinsip *good corporate governance* yang diterapkan secara konsisten dapat menjadi penghambat dan mengurangi penyimpangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan laporan keuangan

yang fundamental perusahaan ini. Hal ini disebabkan upaya menerapkan prinsip *good corporate governance* membuat sebuah perusahaan akan mempunyai komite audit dan komisaris independen sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Beberapa studi menyimpulkan bahwa ada hubungan antara karakteristik komite audit dan komisaris independen dengan upaya manajemen laba sebagai ukuran keberhasilan penerapan prinsip *good corporate governance*. Komite audit juga memiliki hubungan positif antara komite audit dengan berkurangnya tekanan manajer terhadap komite audit pada saat menyusun laporan keuangan serta menurunnya kemungkinan dilakukannya manajemen laba. Independensi komite audit merupakan salah satu ukuran penerapan prinsip *good corporate governance*. Serta keberadaan Dewan Komisaris akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rakayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer.

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* untuk menjamin bahwa transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stake holder, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan. *Good corporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan agar mencapai keseimbangan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva maka semakin besar perusahaan tersebut akan semakin besar pengawasan terhadap kinerja perusahaan itu juga, perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manager untuk melakukan manajemen laba, dengan adanya *corporate governance* akan meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. sehingga dengan adanya *corporate Governance* maka akan memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap praktik manajemen laba.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.30

Peneliti Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Variabel Uji Penelitian
Triatmojo (2013)	Analisis hubungan leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba	-variabel leverage yang diproksikan dengan <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh terhadap manajemen laba. -variabel profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan yang diproksikan dengan <i>net profit margin</i> berpengaruh terhadap manajemen laba	Regresi Linier Berganda
Yamaditya (2014)	pengaruh asimetri informasi, leverage dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba	asimetri informasi yang diproksikan dengan <i>relative bid-ask spread</i> dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aktiva berpengaruh positif	Regresi Linier Berganda

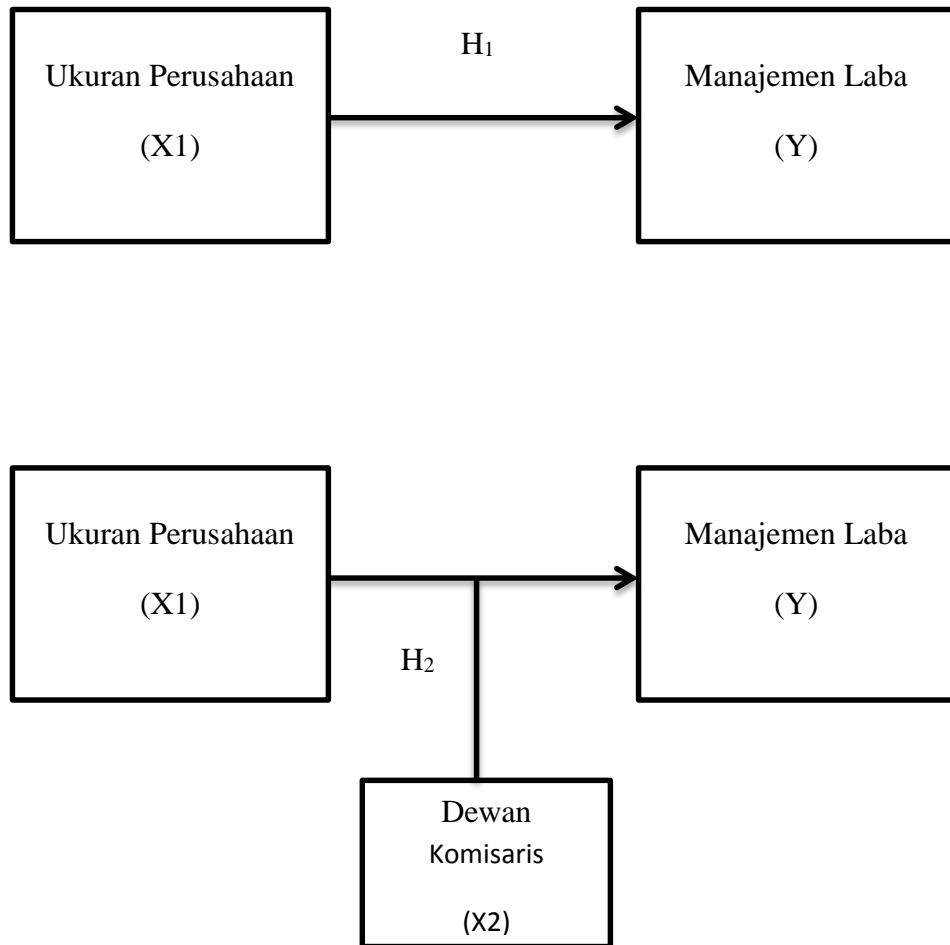
	pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2013	terhadap praktik manajemen laba	
Kartika (2012)	analisis pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap Manajemen laba	<p><i>Good Corporate Governance</i> diproksikan dengan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan <i>CEO duality</i>.</p> <p>-Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba</p> <p>-Komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>-Komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>-Profitabilitas pada</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>

		<p>penelitian ini diproksikan dengan <i>Return on Asset</i> (ROA) roa berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.</p>	
<p>Yatulhusna (2015)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.</p>	<p>profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan ROA (<i>Return On Asset</i>) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada suatu perusahaan. Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada suatu perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada suatu perusahaan.</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>

Sumber: *Jurnal Akuntansi*.

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.32



I. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menemukan teori yang baru. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1 Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen

laba, sehingga dengan pelaporan laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik untuk menanamkan dananya.

Hasil penelitian Halim, dkk. (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang cukup signifikan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba dimana perusahaan besar memiliki aktifitas operasional yang lebih kompleks selain itu perusahaan besar juga lebih dituntut untuk memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Manajemen Laba.

2 *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva maka semakin besar perusahaan tersebut akan semakin besar pengawasan terhadap kinerja perusahaan itu juga, perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manager untuk melakukan manajemen laba, dengan adanya *corporate governance* akan meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. sehingga dengan adanya *corporate Governance* maka akan memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap praktik manajemen laba.

H₂: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi hubungan antara Ukuran perusahaan dengan Manajemen Laba.